



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,  
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 6 APRIL 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 154 ayat (10)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Donatus Nimbitkendik
2. Abdul Rahman

**ACARA**

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 6 April 2016, Pukul 09.05 – 09.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar      | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Donatus Nimbitkendij

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mochtar Saenong

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB**

**1. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Pemohon, kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perbaikan dalam Perkara Nomor 27/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon silakan memperkenalkan diri yang hadir siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Terima kasih, Majelis yang kami hormati, yang kami muliakan. Yang hadir adalah Pihak Prinsipal, Dr. Donatus Nimbitkendij, M.T.P. Saya Kuasa Hukum, Jamaluddin Rustam. Terima kasih, Majelis.

**3. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Baik, terima kasih. Pak Jamauliddin Rustam, ya. Kepalanya sudah sama-sama licin sama saya. Sudah mulai terang. Gunawan, gundul tapi masih menawan.

Silakan jelaskan garis besar perbaikan permohonan yang sudah disampaikan, bacakan garis besarnya saja. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Bahwa permohonan perbaikan kami, kami akan bacakan garis-garis besarnya saja, yang lain dianggap dibacakan. Baik, kami mulai.

Assalamualaikum wr. wb. Pada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal permohonan pengujian materiil judicial review Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Jamaluddin Rustam, Mochtar Saenong, sebagai Kuasa Hukum dari Drs. Donatus Nimbitkendij dan

Abdul Rahman, keduanya adalah warga negara Republik Indonesia. Saya langsung saja, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Satu bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 dan seterusnya (...)

**5. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Bagaimana kalau ... maaf, ya. Langsung pada pokok permohonannya.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Baik, jadi kewenangan Mahkamah dan legal standing dianggap dibacakan.

**7. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, dianggap dibacakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Saya masuk kepada pokok-pokok permasalahan secara singkat kami sampaikan bahwa yang pertama Pemohon adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 17 Desember sebagai pasangan calon. Setelah itu terbit SK Nomor Urut Nomor 3 Tahun 2015, kemudian ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor 2. Tahapan ini sebetulnya sudah lewat, lalu tiba-tiba Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat mengeluarkan SK tersebut berdasarkan SK Nomor 4. Jadi sudah ditetapkan, sudah mulai tahapan dikeluarkan berdasarkan SK Nomor 4. Di sinilah awalnya kami keberatan. Jadi setelah terbitnya SK Nomor 4 Pemohon ini menempuh upaya hukum sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 bahwa apabila terjadi keberatan terhadap persyaratan pencalonan, maka ada dua hal yang ditempuh. Yang pertama, ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95. Pasal 94 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 itu mensyaratkan apabila keberatan, maka silakan mengajukan keberatan secara administrasi ke panwas, dan itu dilakukan. Atas dasar permohonan terbitnya SK Nomor 4 itu permohonan Pemohon mengajukan ke panwas sesuai mekanisme PKPU dan undang-undang, itu dikabulkan akhirnya, KPU Kabupaten Papua Barat menyatakan bahwa Pemohon tetap bersyarat, memenuhi syarat sebagai pasangan calon, sehingga diterbitkan lagi SK Nomor 5 karena proses administrasi dikabulkan sesuai persyaratan Pasal 94 tersebut, sehingga terbit lagi SK Nomor 5 menyatakan bahwa Donatus

(Pemohon) dinyatakan sebagai pasangan yang bersyarat karena sudah dilakukan tahapan verifikasi dan penelitian.

Kemudian tiba-tiba KPU Provinsi Papua Barat melakukan lagi membatalkan lagi SK Nomor 5 tanpa dasar yang seharusnya siapapun yang keberatan terhadap adanya karena ini adalah keputusan kolektif kolegial yang dilakukan oleh KPU seharusnya upaya yang ditempuh melakukan juga upaya PKPU Pasal 98 dan 95. Ini tidak dilakukan, tiba-tiba menerbitkan SK Nomor 66 yang langsung segera serta merta membatalkan SK Nomor 5 tersebut, terbit SK Nomor 66. Atas terbitnya SK 66 di situlah Pemohon mengajukan keberatan ke pengadilan tinggi tata usaha negara setelah melalui proses ... apa ... melalui proses sesuai dengan Pasal 94, Pak, melalui proses ke panwas itu ditolak. Akhirnya sesuai dengan Pasal 95, mereka mengajukan keberatan ke PTUN, akhirnya mengajukan gugatan, mendaftarkan dalam Perkara Nomor 20 Pilkada PT TUN Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa SK 66 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Akhirnya itu yang dilakukan sehingga pengadilan tinggi menyatakan ... nah, namun KPU provinsi mengajukan lagi kasasi ke Mahkamah Agung yang oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2015 mengatur bahwa putusan badan tata usaha negara pengadilan tinggi itu bersifat final dan mengikat Pasal 15, Pasal 18 itu jelas. Berarti tidak lagi upaya hukum kasasi yang bisa dilakukan oleh KPU dalam hal ini.

Namun demikian tetap melakukan dan ... dan lucunya KPU tetap melakukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan itu, sekalipun ada PERMA yang mengatur. Kami ... sudah ada dalam gugatan kami, Majelis. Akhirnya tetap dikabulkan dan Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tinggi lagi.

Nah, akhirnya Pihak Pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa karena terdapat kekeliruan yang nyata dan ada bukti baru bahwasanya ada kekhilafan dalam penerapan hukum tersebut. Namun kami pada saat hendak mengajukan gugatan di pengadilan tinggi Makassar, kami terhalang oleh norma Pasal 154 ayat (10) alasannya (...)

**9. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Waktu ingin mengajukan PK?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya, Pak. Waktu ingin mengajukan PK karena waktu itu ... waktu itu kami ditolak dengan alasan bahwa norma Pasal 154 ayat (10) itu enggak bisa karena putusan pengadilan tinggi itu ... putusan Mahkamah

Agung, kasasi bersifat final dan mengikat. Akhirnya kami mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung.

**11. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Bahwa apa dasarnya Mahkamah Agung dan Badan Pengawas Mahkamah Agung? Dua ... dua institusi itu kami ajukan dan akhirnya kedua-duanya tetap mengeluarkan keputusan yang pada prinsip dasarnya mengatakan bahwa tetap tidak bisa karena ada normal Pasal 154 ayat (10) yang menyatakan bahwa putusan kasasi bersifat final dan mengikat, itu.

**13. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Jadi meskipun PK itu upaya hukum luar biasa, tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena normanya memang demikian?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya.

**15. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Gitu, ya? Oke.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Jadi norma itu masih ... saya bacakan, Majelis, "Putusan Mahkamah Agung Indonesia bagian dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain." Upa ... upaya hukum lain ini yang tidak jelas, tidak ada mengatakan upaya hukum luar biasa. Sehingga kami menguji di ... di Mahkamah Konstitusi.

**17. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oleh pengadilan tinggi TUN, norma lain itu diterjemahkan bahwa PK enggak bisa? Gitu, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya, seperti itu, Majelis. Jadi (...)

**19. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Itu penolakannya masuk sini, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Sudah ada di dalam ... dalam permohonan. Sudah kami ajukan bukti.

**21. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Itu yang diuji ke sini? Yang Saudara uji apa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Yang ... yang kami uji, Majelis, Pasal 154 norma itu. Jadi itu menje ... merupakan bukti saja yang ... yang ... yang ... yang saya bilang tadi.

**23. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, ya, ya, ya, jelaskan 154, itu?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya. Pasal 154 normanya, Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, itu yang putusan kasasi ... saya bacakan, Majelis, karena ini normatif.

**25. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, bacakan, ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Izin. Supaya ... karena ini kutipan pasal jadi saya harus baca.

**27. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, baca, enggak apa-apa. Jadi jelas muaranya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya. Jadi ketentuan Pasal 154 ayat (1) itu mengatakan, "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat



(9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain." Ini yang kami uji.

**29. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Terus? Ya, lanjut.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Jadi saya lanjut barangkali yang singkat-singkat saja, Majelis.

**31. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, lanjut ... lanjut.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Terkait dengan adanya Pasal 154 itu, disitulah bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara itu di ... dihalangi untuk menempuh upaya hukum luar biasa.

Jadi itu alasan-alasan permohonan kami yang lebih jelasnya ada dalam permohonan kami dianggap dibacakan. Jadi kami masuk pada poin petitum saja, Majelis.

**33. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Di petitum ini saya juga melengkapi nasihat dari, Bapak Manan ... Manahan Sitompul. Bahwa pada ... pada ... pada sidang tanggal 24 bahwa harus ada alterna ... ada ... dipikirkan alternatif, kami sudah masukkan di poin 4.

Selengkapnya petitum kami bacakan, Majelis. Yang pertama, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5656 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5656 tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, dan/atau ... ini petitum alternatif.
  4. Menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656 hendaknya dimaknai dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, upaya hukum peninjauan kembali.
  5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian surat permohonan pengujian undang-undang judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan atas perkenannya diucapkan banyak terima kasih. Jakarta, 4 April 2016, hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Jamaluddin Rustam, Mochtar Saenong.

Demikianlah perbaikan pokok-pokok permohonan kami, Majelis, dan selebihnya dianggap dibacakan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

### **35. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, jadi kami sudah pahami pokok-pokok permohonannya juga kemudian termasuk petitumnya, tapi masih alternatif, ya? Sebetulnya kan sebaiknya enggak usah pakai alternatif begini, tapi enggak apa-apa. Artinya, yang Saudara kehendaki dalam alternatif itu sebetulnya, yang diinginkan, ya, kalau dinyatakan tidak

berlaku berarti kan pasalnya hilang sama sekali, ya kan? Tapi enggak apa-apa, di sini Saudara sudah minta ex aequo et bono, ya enggak apa-apa.

"Hendaknya dimaknai dapat mengajukan upaya hukum luar biasa." Jadi, harus tegas begitu, ya, walaupun upaya hukum luar biasa itu sebetulnya ya, ya kalau memang sudah dibatasi ya kan begitu, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya.

**37. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Baik. Jadi, kita enggak berikan nasihat lagi. Nasihatnya sudah selesai, ya. Jadi, Pak Donatus Nimbikendij, ya, ini luar biasa juga, ya, kejadiannya luar biasa. Mungkin baru pertama kali ya di Indonesia yang dialami oleh Beliau ini. Jadi, tolak, jadi, tolak, jadi, tolak, oke baik.

Bukti yang sudah disampaikan itu P-1 sampai dengan P-24?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Siap, Majelis.

**39. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Betul, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Betul.

**41. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke, kita sahkan dulu, ya, ini sudah diverifikasi dan lengkap, ya.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Masih ada bukti tambahan terkait dengan warga negara sebagai pembayar pajak, bukti tambahan nanti, Majelis.

**43. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh, ya, boleh. Sudah ada?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Belum kami bawa.

**45. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Belum, ya, nanti disampaikan saja ke bagian Kepaniteraan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Sekaligus kami akan mengajukan ahli pada sidang berikutnya, Majelis. Kami akan mengajukan ahli.

**47. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Nanti kita tentukan dulu, ya, kalau ... kami akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim nasibnya bagaimana ini. Apa dilanjutkan, apa enggak dilanjutkan, apa langsung dikabulkan, atau enggak dikabulkan? Nah ini belum tahu ini. Bisa saja enggak usah sidang berikutnya kalau Hakim berpendapat lain bahwa ini sudah cocok mesti dikabulkan, enggak pakai proses lagi juga bisa. Enggak usah pakai ahli juga boleh karena Hakimnya sudah pada ahli. Tapi bisa juga sebaliknya, ya kan? Atau memang kalau kita menginginkan harus ada dilanjutkan nanti kita sampaikan, ya, ditunggu saja. Tapi paling enggak sudah siap-siap ya, sudah siap-siap.

Baik, Pak Donatus cukup, ya? Silakan, sudah jauh-jauh dari Fakfak ini.

**48. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Baik, terima kasih, mohon waktu izin.

**49. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Silakan, Pak.

**50. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Jadi, kami datang menghadap Bapak Ketua Majelis Hakim sama Anggota. Untuk kami dari Papua, kami ingin untuk mencari kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya karena hak konstitusional, hak politik

rakyat itu dihilangkan, sehingga saya merasa bertanggung jawab, sehingga sampai di meja Majelis. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya dengan pasangan saya sebagai calon yang sudah ditetapkan dengan Nomor Urut 2, kemudian dengan dasar hukum yang tidak jelas, kemudian hak politik kita sebagai calon bupati dan wakil bupati itu dihilangkan.

**51. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Boleh enggak disampaikan sedikit apa sih alasannya waktu itu dibatalkan?

**52. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Sedikit pun tidak ada alasan yang disampaikan. Alasan yang mereka sampaikan waktu itu dari KPU Provinsi Papua Barat mereka melaksanakan perintah KPU, surat KPU RI itu yang alasan mereka.

**53. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, tapi kan harus ada dong, enggak bisa begitu saja, kan. Bahkan juga Mahkamah Agung kok bisa malah mengabulkan permohonan kasasi. Apa alasannya yang ada di situ? Benar apa enggak itu urusan lain. Apa alasannya?

**54. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Menurut mereka adalah tidak cukup, padahal sesuai dengan ketentuan (...)

**55. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Tidak cukup apa ini?

**56. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Syarat dukungannya.

**57. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh, ini independent apa partai?

**58. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Partai.

**59. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Partai?

**60. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya, jadi ya menurut keputusan mereka di MK tidak bersyarat itu, itu (...)

**61. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Di MA.

**62. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Karena kami tidak memenuhi syarat 15%.

**63. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh, akumulasi kumpulan partai-partai pendukung?

**64. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

He eh. Padahal itu sudah diselesaikan di sidang di panwas bahwa kita sudah memenuhi syarat dengan KPU, malah kita sudah sidang di DKPP.

**65. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

DKPP apa putusannya?

**66. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Dinyatakan sah. P-3 itu kami punya, sehingga memenuhi syarat.

**67. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Dilampirkan enggak di sini hasil DKPP?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Dilampirkan, Majelis.

**69. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Bukti P berapa itu? Oh, tapi adalah pokoknya, ya?

**70. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ada.

**71. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke.

**72. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Dan memenuhi syarat. Tapi itulah yang kemudian sebenarnya menurut kita sudah selesai, sehingga saya ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 2.

**73. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Itu putusan DKPP sebelum putusan Mahkamah Agung?

**74. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**75. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ha?

**76. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya, benar. Keputusan DKPP duluan keluar.

**77. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Padahal pengadilan tinggi TUN juga sudah membatalkan putusan KPU provinsi?

**78. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**79. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke.

**80. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Karena itu keputusan DKPP sudah keluar karena kita memenuhi 20%.

**81. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Baik, baik. Putusan Mahkamah Agung dilampirkan enggak di sini, Pak Jamaluddin?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Dilampirkan, Majelis.

**83. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Lampirkan, ya?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Jadi, izin. Putusan Mahkamah Agung kami lampirkan. Yang DKPP kami belum lampirkan, nanti kami jadikan tambahan bukti bersamaan dengan bukti pajak.

**85. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh, belum?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya, untuk DKPP yang lain sudah semua. Jadi, putusan pengadilan tinggi, Putusan Mahkamah Agung, PERMA Nomor 15 yang menyatakan final dan mengikat kami lampirkan semua.

**87. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ini cepat, ya. Masalahnya, kami akan pelajari itu karena kami akan lapor ke RPH, satu, dua hari ini.



**88. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Besok, Majelis.

**89. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Siap, besok.

**91. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Jadi, kami akan cek putusan Mahkamah Agung itu kenapa bunyinya seperti itu. Kemudian putusan DKPP itu apa, ya. Jadi (...)

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Putusan ... izin. Putusan DKPP kami masukkan besok bersamaan dengan bukti pembayaran pajak sebagai bukti tambahan. Terima kasih, Majelis.

**93. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, pembayaran pajak mah enggak pentinglah. Kan, Beliau kan memang calon?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya.

**95. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, memang hak konstitusionalnya jelas, legal standing-nya.

**96. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**97. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Itu enggak terlalu penting itu pembayaran pajak itu. Toh, juga kalau enggak berpajak kan enggak bisa lolos sebagai calon, kan?

**98. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**99. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kan ada syaratnya NPWP dan pembayaran pajak itu, kan?

**100. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ada.

**101. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Yang penting itu. Tapi itu boleh-boleh saja untuk bukti tambahan, enggak ada masalah. Ya, putusan Mahkamah Agung itu sama DKPP ... eh, Mahkamah Agung sudah. DKPP, ya?

**102. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**103. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Dilampirkan, ya.

**104. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Siap, Majelis.

**106. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ini menarik ini masalahnya.

**107. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**108. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Maju-mundur, maju-mundur ini. Ya, kan?

**109. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**110. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Lolos, batal, lolos lagi, batal lagi, lolos lagi, batal lagi. Ya, oke.

**111. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Izin. Benar sekali. Saya hitung lima kali, Pak.

**112. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya (...)

**113. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Dan saya (...)

**114. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Tangannya masih lima tadi itu.

**115. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Itu benar-benar saya lihat itu kejahatan politik, kriminalisasi terhadap pasangan (...)

**116. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ah, itu nanti itu urusannya kalau kejahatan politik itu.

**117. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Karena sampai dengan kemarin pemilihan, itu Nomor 2 tetap, tidak dihilangkan dalam kartu suara.

**118. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh, dalam kartu suara tetap ada?

**119. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Tetap ada. Ada bukti kita bawa. Itu Nomor 1, Nomor 3. Nomor 2 tetap ada, tapi gambar saya tidak ada. Tapi dilakukan proses pemilihan.

**120. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh, gambarnya tidak ada?

**121. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

He eh. Dan hak saya sudah dicabut.

**122. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh.

**123. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Sampai setingkat itu sudah dicetak.

**124. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Jangan-jangan Nomor 2 yang enggak ada gambar itu menang malah? Enggak? Dipilih orang, enggak?

**125. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Jadi, memang menarik, Pak. Memang sangat menarik.

**126. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Baik, baik. Ya, ya, menarik.

**127. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Tapi itulah yang kemudian kami meluruskan, mencari kebenaran, keadilan di (...)

**128. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, ya, ya.

**129. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Di Majelis ini.

**130. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Makanya kita ingin mendalami karena ini menarik memang, menarik, ya.

**131. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**132. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Makanya kami harus tahu apa persoalannya itu. Tadi sudah disampaikan, ya kan? Cukup, ya, Pak? Pak Donatus?

**133. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Kalau berkenan saya tambahkan sedikit.

**134. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Boleh, boleh.

**135. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Jadi, pokok persoalannya itu, Pak, yang menarik adalah bahwa saya sudah ditetapkan. Berarti secara prinsipal, semua syarat sudah selesai. Berarti hak saya untuk masuk jadi calon untuk mengikuti proses pilkada. Tetapi kemudian itu dihilangkan (...)

**136. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Itu ... sebentar. Saya tanya, putusan Mahkamah Agung itu, itu setelah selesai proses pencalonan?

**137. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**138. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Waktu putusan pengadilan tinggi, itu sudah selesai belum?

**139. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Sudah selesai semua juga.

**140. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Enggak, artinya proses pencalonan sudah selesai? Sudah foto, apa segala macam sudah dicetak? Belum?

**141. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Itu sudah (...)

**142. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Tahapan-tahapannya, tahapan?

**143. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Sudah seleba ... selesai, Pak.

**144. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

He eh.

**145. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Sudah selesai.

**146. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Sudah selesai?

**147. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Sudah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Nomor 2. Sudah siap mau pemilu, Pak.

**148. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Pilkada?

**149. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya. Siap pilkada, baru kemudian ada keputusan dari KPU Provinsi Papua Barat berdasarkan surat dari KPU RI.

**150. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke. Enggak, maksud saya waktu itu kan ada putusan pengadilan tinggi TUN?

**151. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**152. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Yang membatalkan putusan KPU provinsi?

**153. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Benar.

**154. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, toh? Betul, ya?

**155. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya.

**156. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Itu tahapannya sudah sampai mana dulu pencalonannya?

**157. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Itu sudah selesai proses penetapan sudah selesai, verifikasi berkas calon sudah selesai.

**158. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke.

**159. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Kita sudah jalan sudah satu bulan, sudah sosialisasi, sudah kampanye.

**160. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh, sudah kampanye.

**161. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Sudah kampanye, Pak. Satu bulan baru proses pencabutan hak kita keluar dari KPU provinsi.

**162. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Antara putusan PTUN (Pengadilan Tinggi TUN) dengan Mahkamah Agung itu berapa lama tenggang waktunya?

**163. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Dua minggu lebih.

**164. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oh, cepat sekali, ya.

**165. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Dua minggu sampai tiga minggu, ya, satu bulan lah kita.

**166. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Walaupun putusan pengadilan tinggi itu menurut undang-undang final, betul Pak Jamaluddin?

**167. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya, ada kami lampirkan dalam PERMA Nomor 5 Pasal 15, Pasal 16.

**168. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Bukan PERMA, menurut undang-undang pilkadanya?



**169. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Gimana, Majelis?

**170. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Itu PERMA maksudnya?

**171. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Ya, PERMA.

**172. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke. PERMA-nya dicantumkan di sini, ya?

**173. KUASA HUKUM PEMOHON: JAMALUDDIN RUSTAM**

Kami jadikan bukti, Majelis.

**174. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Oke, baik. Cukup, ya, Pak Donatus, ya?

**175. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya, terima kasih.

**176. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Kami 09.30 WIB ada sidang lagi ini, saya mau menyidangkan Teluk Bintuni kampung Bapak juga.

**177. PEMOHON: DONATUS NIMBITKENDIJ**

Ya, tetangga. Terima kasih, Pak.

**178. KETUA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, baik, ya. Nanti tinggal menunggu panggilan sidang kapan selanjutnya atau pemberitahuan dari Mahkamah, ya.

Dengan demikian sidang hari ini kita cukupkan dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.30 WIB**

Jakarta, 6 April 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004